

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PROVINSI	
TAHUN	2025
1. Informasi Umum	
1.1. Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
1.2. Penanggung Jawab	BARU, S.Pd., M.si
1.3. Waktu Pelaksanaan	12 BULAN
1.4. Referensi Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi b. Sasaran : Administrasi umum PD
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan administrasi umum PD merupakan sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan dalam setiap organisasi, bahkan instansi pemerintah yang salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; b. Kegiatan organisasi khususnya perkantoran tak lepas dari kegiatan pelayanan administrasi umum PD. Hal ini sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan. Kegiatan ini seluruhnya menunjang keberlangsungan aktivitas perkantoran, sehingga menjadikan kegiatan kantor berjalan baik. c. Salah satu langkah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, maka perlu didukung dengan dana untuk kegiatan operasional dimaksud. d. Adapun pelayanan administrasi perkantoran meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor ➤ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor e. Agar pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan perencanaan dan pendanaan setiap aktivitas dengan baik.
2.2. Sasaran (Outcome)	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan
2.3. Keluaran yang diharapkan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dan jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
2.4. Indikator dan Target Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Indikator Kinerja : Pelayanan administrasi umum PD yang berjalan dengan baik dan lancar b. Target Kinerja: 12 bulan
2.5. Lokasi	Palangka Raya

3. Tahapan Aktivitas (Time Schedule)

No	Tahapan Aktivitas	Waktu (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor												
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												

4. Anggaran dan Sumber Dana Sumber Dana: APBD Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga	Total
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	465.000.000	465.000.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	1.952.982.246	1.952.982.246

5. Lain-lain

Palangka Raya, Mei 2025

Mengetahui
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah



BARU, S.Pd., M.Si
NIP. 19700228 199803 1 007

PPTK,

SISKA, SE
NIP.19801008 201101 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PROVINSI	
TAHUN	2025
1. Informasi Umum	
1.1. Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
1.2. Penanggung Jawab	BARU, S.Pd., M.si
1.3. Waktu Pelaksanaan	12 BULAN
1.4. Referensi Perencanaan	<p>a. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Program kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>b. Sasaran : Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.</p>
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	<p>a. Jasa penunjang pemerintah daerah merupakan sesuatu yang wajib dan harus ada dalam setiap organisasi, bahkan instansi pemerintah yang salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>b. Kegiatan organisasi khususnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah tak lepas dari kegiatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah. Hal ini sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan. Kegiatan ini seluruhnya menunjang keberlangsungan aktivitas perkantoran, sehingga menjadikan kegiatan kantor berjalan dengan baik.</p> <p>c. Salah satu langkah dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, maka perlu didukung dengan dana untuk kegiatan operasional dimaksud.</p> <p>d. Adapun pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belanja Asuransi Barang Milik Daerah ➤ Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor <p>e. Agar pemeliharaan barang milik daerah dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan perencanaan dan pendanaan setiap aktivitas dengan baik.</p>
2.2. Sasaran (Outcome)	Persentase barang milik daerah yang dipelihara
2.3. Keluaran yang diharapkan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
2.4. Indikator dan Target Kinerja	<p>a. Indikator Kinerja : Pemeliharaan barang milik daerah berjalan dengan baik</p> <p>b. Target Kinerja: 12 bulan</p>
2.5. Lokasi	Palangka Raya

3. Tahapan Aktivitas (Time Schedule)

No	Tahapan Aktivitas	Waktu (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah												
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor												

4. Anggaran dan Sumber Dana
Sumber Dana: APBD Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga	Total
1	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	12 bulan	5.000.000	5.000.000
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	12 bulan	2.200.000.000	2.200.000.000
	JUMLAH		2.205.000.000	2.205.000.000

5. Lain-lain

Palangka Raya, Januari 2025

Mengetahui
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah

PPTK,



BARU, S.Pd., M.Si
NIP.19700228 199803 1 007



SISKA, SE
NIP.19801008 201101 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PROVINSI													
TAHUN				2025									
1. Informasi Umum													
1.1. Unit Kerja				Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah									
1.2. Penanggung Jawab				BARU, S.Pd., M.si									
1.3. Waktu Pelaksanaan				12 BULAN									
1.4. Referensi Perencanaan				a. Sesuai Tupoksi sebagai Sub Bagian Keuangan untuk melaksanakan tugas kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. b. Untuk pencapaian pelaksanaan kegiatan selanjutnya didukung oleh Surat Keputusan tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan c. Sasaran : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.									
2. Rincian Aktivitas													
2.1. Deskripsi Ringkas				a. Sesuai Tupoksi sebagai Sub Bagian Keuangan untuk melaksanakan tugas kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD;									
2.2. Sasaran (Outcome)				Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah									
2.3. Keluaran yang diharapkan				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
2.4. Indikator dan Target Kinerja				a. Indikator Kinerja : Tersedianya laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD b. Target Kinerja: 12 bulan									
2.5. Lokasi				Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah									
3. Tahapan Aktivitas (Time Schedule)													
No	Tahapan Aktivitas	Waktu (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD												
4. Anggaran dan Sumber Dana Sumber Dana: APBD Provinsi Kalimantan Tengah													
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga		Total								
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	12 bulan	15.000.000		15.000.000								

5. Lain-lain

Palangka Raya, Januari 2025

Mengetahui
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah

PPTK,



BARU, S.Pd., M.Si
NIP. 19700228 199803 1 007

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siska'.

SISKA, SE
NIP.19801008 201101 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PROVINSI	
TAHUN	2025
1. Informasi Umum	
1.1. Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
1.2. Penanggung Jawab	BARU, S.Pd., M.si
1.3. Waktu Pelaksanaan	12 BULAN
1.4. Referensi Perencanaan	<p>a. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Program penunjang urusan pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>b. Sasaran : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>
2. Rincian Aktivitas	
2.1. Deskripsi Ringkas	<p>a. Jasa penunjang urusan pemerintah Daerah merupakan sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan dalam setiap organisasi, bahkan instansi pemerintah yang salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya;</p> <p>b. Kegiatan organisasi khususnya kepegawaian tak lepas dari Jasa penunjang urusan pemerintah Daerah. Hal ini sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan. Kegiatan ini seluruhnya menunjang keberlangsungan aktivitas kepegawaian, sehingga menjadikan kegiatan kantor berjalan baik.</p> <p>c. Salah satu langkah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian, maka perlu didukung dengan dana untuk kegiatan operasional dimaksud.</p> <p>d. Adapun pelayanan administrasi kepegawaian meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ➤ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya <p>e. Agar pelayanan administrasi kepegawaian dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan perencanaan dan pendanaan setiap aktivitas dengan baik</p>
2.2. Sasaran (Outcome)	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah
2.3. Keluaran yang diharapkan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
2.4. Indikator dan Target Kinerja	<p>a. Indikator Kinerja : Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</p> <p>b. Target Kinerja: 12 bulan</p>
2.5. Lokasi	Palangka Raya

3. Tahapan Aktivitas (Time Schedule)

No	Tahapan Aktivitas	Waktu (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya												

4. Anggaran dan Sumber Dana Sumber Dana: APBD Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga	Total
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	10.000.000	10.000.000
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 bulan	1.067.500.000	1.067.500.000
	JUMLAH			1.077.500.000

5. Lain-lain

Palangka Raya, Mei 2025

Mengetahui
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah

PPTK,



BARU, S.Pd., M.Si
NIP.19700228 199803 1 007

SISKA, SE
NIP.19801008 201101 2 001

4. Anggaran dan Sumber Dana				
Sumber Dana: APBD Provinsi Kalimantan Tengah				
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga	Total
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	20.000.000	20.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 bulan	15.000.000	15.000.000

5. Lain-lain

Palangka Raya, Januari 2025

Mengetahui
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah

PPTK,



BARU, S.Pd., M.Si
NIP. 19700228 199803 1 007

SISKA, SE
NIP.19801008 201101 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PROVINSI													
TAHUN		2025											
1. Informasi Umum													
1.1 Unit Kerja		Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah											
1.2 Penanggung Jawab		BARU, S.Pd., M.si											
1.3 Waktu Pelaksanaan		12 BULAN											
1.4 Referensi Perencanaan		a. Sesuai Tupoksi sebagai Sub Bagian Keuangan untuk melaksanakan tugas kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. b. Untuk pencapaian pelaksanaan kegiatan selanjutnya didukung oleh Surat Keputusan tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan c. Sasaran : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.											
2. Rincian Aktivitas													
2.1. Deskripsi Ringkas		a. Sesuai Tupoksi sebagai Sub Bagian Keuangan untuk melaksanakan tugas kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.											
2.2. Sasaran (Outcome)		Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
2.3. Keluaran yang diharapkan		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
2.4. Indikator dan Target Kinerja		a. Indikator Kinerja : Tersedianya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Target Kinerja: 12 bulan, 100 %											
2.5. Lokasi		Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah											
3. Tahapan Aktivitas (Time Schedule)													
No	Tahapan Aktivitas	Waktu (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
4. Anggaran dan Sumber Dana Sumber Dana: APBD Provinsi Kalimantan Tengah													
No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga		Total								
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	65.000.000		65.000.000								

5. Lain-lain

Palangka Raya, Januari 2025

Mengetahui
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah

PPTK,



BARU, S.Pd., M.Si
NIP. 19700228 199803 1 007

SISKA, SE
NIP.19801008 201101 2 001

4. Anggaran dan Sumber Dana
Sumber Dana: APBD Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga	Total
1	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	585.690.000	585.690.000

5. Lain-lain

Palangka Raya, Mei 2025

Mengetahui
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah

PPTK,



BARU, S.Pd., M.Si
NIP. 19700228 199803 1 007



SISKA, SE
NIP.19801008 201101 2 001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.
6. Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

- Kegiatan** : Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan** : Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
- Kode Rekening** : 1.05.01.1.01.0001
- Pagu Anggaran** : Rp. 20.000.000,-

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025**

Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Rek. Sub Kegiatan	:	1.05.01.1.01.0001	
Capaian Program	:	Persentase Keterlaksanaan	: 100 %
Masukan	:	Jumlah dana yang tersedia	: Rp. 20.000.000
Keluaran	:	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	: 2 dokumen
Hasil	:	Nilai evaluasi SAKIP SKPD	: A
Kelompok Sasaran	:	Satpol PP Provinsi Kalteng	

A. Latar Belakang

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, tujuan yang harus dicapai adalah “Memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Serta Menegakkan Peraturan Daerah/Kepala Daerah, serta Perlindungan Masyarakat,” dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah provinsi;
2. Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel;

Dari sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel, salah satu indikatornya adalah nilai evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada tahun 2025 target yang harus dicapai adalah minimal B atau BB. Untuk mewujudkan pencapaian indikator tersebut, tentunya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, bahwasanya perlu disusun perencanaan untuk penganggaran SKPD.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD dimaksudkan untuk menyediakan perencanaan dan penganggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk :

- Tersusunnya dokumen penganggaran (Rencana Kerja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.
- Tersusunnya dokumen penganggaran (Perubahan Renja Kerja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup :

1. Penyusunan Renja APBD tahun 2026;
2. Penyusunan Perubahan Renja APBD 2025;
3. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal.

Tahapan kegiatan :

1. Menyiapkan SK Tim Penyusun;
2. Menyusun Rencana Kerja (Renja) 2026 dan Renja Perubahan APBD 2025, termasuk menyusun kebutuhan dana kegiatan;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait untuk penyusunan RKA Kegiatan;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan anggaran per kegiatan;
5. Rapat koordinasi internal dan eksternal.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola.

D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Desember

Time SCHEDULE
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1.	Perencanaan													
2.	Penyusunan Renja APBD													
3.	Penyusunan Renja APBDP													
4.	Evaluasi dan Pelaporan													

E. Rencana Penganggaran

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

1. Belanja Barang dan Jasa Rp. 20.000.000,-

Terdiri dari belanja ATK, Cetak (penggandaan), dan biaya perjalanan dinas dalam daerah.

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah tahun 2024.

Mengetahui :

Plt. SEKRETARIS,



JAYA, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691230 199512 1 003

Palangka Raya, Januari 2025

PPTK,



Yeri, A.Md

NIP. 19790515 200903 1 001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

- Kegiatan** : Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan** : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
- Kode Rekening** : 1.05.01.1.01.0002
- Pagu Anggaran** : Rp. 15.000.000,-

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025**

Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Rek. Sub Kegiatan	:	1.05.01.1.01.0002
Capaian Program	:	Persentase Keterlaksanaan : 100%
Masukan	:	Jumlah dana yang tersedia : Rp. 15.00.000
Keluaran	:	Jumlah dokumen RKA SKPD dan : 1 dokumen Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kelompok Sasaran	:	Satpol PP Provinsi Kalteng

A. Latar Belakang

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, tujuan yang harus dicapai adalah “Memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Serta Menegakkan Peraturan Daerah/Kepala Daerah, serta Perlindungan Masyarakat,” dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah provinsi;
2. Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel;

Dari sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel, salah satu indikatornya adalah nilai evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada tahun 2025 target yang harus dicapai adalah minimal B atau BB. Untuk mewujudkan pencapaian indikator tersebut, tentunya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Wujud dari perencanaan kerja tersebut dituangkan bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dimaksudkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk :

- Menyusun dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup :

1. Penyusunan RKA - APBD tahun 2026;
2. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal.

Tahapan kegiatan :

1. Menyiapkan SK Tim Penyusun;
2. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2026 termasuk menyusun kebutuhan dana kegiatan;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait untuk penyusunan RKA Kegiatan;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan anggaran per kegiatan;
5. Rapat koordinasi internal dan eksternal;
6. Entry RKA ke aplikasi SIPD.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola.

D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Desember

Time Schedule
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1.	Perencanaan													
2.	Penyusunan RKA													
3.	Koordinasi internal dan eksternal													
4.	Entry RKA													

E. Rencana Penganggaran

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

1. Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.000.000,-
Terdiri dari belanja ATK, dan Cetak (penggandaan).

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah tahun 2025.

Palangka Raya, Januari 2025

Mengetahui :

Plt. SEKRETARIS,



JAYA, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691230 199512 1 003

PPTK,



Yeri, A.Md

NIP. 19790515 200903 1 001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

- Kegiatan** : Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan** : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
- Kode Rekening** : 1.05.01.1.01.0003
- Pagu Anggaran** : Rp. 15.000.000,-

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025**

Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
Rek. Kegiatan	:	1.05.01.1.01.0004	
Capaian Program	:	Persentase Keterlaksanaan	: 100%
Masukan	:	Jumlah dana yang tersedia	: Rp. 15.000.000
Keluaran	:	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	: 1 dokumen
Kelompok Sasaran	:	Satpol PP Provinsi Kalteng	

A. Latar Belakang

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, tujuan yang harus dicapai adalah “Memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Serta Menegakkan Peraturan Daerah/Kepala Daerah, serta Perlindungan Masyarakat,” dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah provinsi;
2. Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel;

Dari sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel, salah satu indikatornya adalah nilai evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada tahun 2025 target yang harus dicapai adalah minimal B atau BB. Untuk mewujudkan pencapaian indikator tersebut, tentunya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Menindaklanjuti perkembangan dan kebutuhan daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Anggaran yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD dimaksudkan untuk menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk :

- Menyusun dokumen perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup :

1. Penyusunan perubahan RKA APBD tahun 2025;
2. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal.

Tahapan kegiatan :

1. Menyiapkan SK Tim Penyusun;
2. Menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025 termasuk menyusun kebutuhan dana kegiatan;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait untuk penyusunan perubahan RKA Kegiatan;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan anggaran per kegiatan;
5. Rapat koordinasi internal dan eksternal;
6. Entry perubahan RKA ke aplikasi SIPD.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola.

D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan September

Time SCHEDULE
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1.	Perencanaan													
2.	Penyusunan RKA													
3.	Koordinasi internal dan eksternal													
4.	Entry RKA													

E. Rencana Penganggaran

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

1. Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.000.000,-

Terdiri dari belanja ATK dan cetak (penggandaan).

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah tahun 2025.

Palangka Raya, Januari 2025

Mengetahui :

Plt. SEKRETARIS,



JAYA, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691230 199512 1 003

PPTK,



Yeri, A.Md

NIP. 19790515 200903 1 001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

- Kegiatan** : Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan** : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
- Kode Rekening** : 1.05.01.1.01.0004
- Pagu Anggaran** : Rp. 15.000.000,-

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025**

Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Rek. Kegiatan	:	1.05.01.1.01.0004
Capaian Program	:	Persentase Keterlaksanaan : 100%
Masukan	:	Jumlah dana yang tersedia : Rp. 15.000.000
Keluaran	:	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan : 1 dokumen Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Kelompok Sasaran	:	Satpol PP Provinsi Kalteng

A. Latar Belakang

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, tujuan yang harus dicapai adalah “Memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Serta Menegakkan Peraturan Daerah/Kepala Daerah, serta Perlindungan Masyarakat,” dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah provinsi;
2. Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel;

Dari sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel, salah satu indikatornya adalah nilai evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada tahun 2025 target yang harus dicapai adalah minimal B atau BB. Untuk mewujudkan pencapaian indikator tersebut, tentunya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Menindaklanjuti hal tersebut perlu disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dimaksudkan untuk menyusun DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk :

- Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup :

1. Penyusunan DPA APBD tahun 2025;
2. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal.

Tahapan kegiatan :

1. Menyiapkan SK Tim Penyusun;
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025 termasuk menyusun kebutuhan dana kegiatan;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait untuk penyusunan DPA SKPD;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan anggaran per kegiatan;
5. Rapat koordinasi internal dan eksternal;
6. Memprint, penggandaan dan penjilidan DPA.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola.

D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Februari.

E. Rencana Penganggaran

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

1. Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.000.000,-

Terdiri dari belanja ATK dan cetak (penggandaan).

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah tahun 2025.

Palangka Raya, Januari 2025

Mengetahui :

Plt. SEKRETARIS,



JAYA, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691230 199512 1 003

PPTK,



Yeri, A.Md

NIP. 19790515 200903 1 001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD**
- Kode Rekening : 1.05.01.1.01.0005**
- Pagu Anggaran : Rp. 15.000.000,-**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025**

Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Rek. Kegiatan	:	1.05.01.1.01.0005
Capaian Program	:	Persentase Keterlaksanaan : 100%
Masukan	:	Jumlah dana yang tersedia : Rp. 15.000.000
Keluaran	:	Jumlah dokumen DPPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD : 1 dokumen
Kelompok Sasaran	:	Satpol PP Provinsi Kalteng

A. Latar Belakang

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, tujuan yang harus dicapai adalah “Memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Serta Menegakkan Peraturan Daerah/Kepala Daerah, serta Perlindungan Masyarakat,” dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah provinsi;
2. Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel;

Dari sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel, salah satu indikatornya adalah nilai evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada tahun 2025 target yang harus dicapai adalah minimal B atau BB. Untuk mewujudkan pencapaian indikator tersebut, tentunya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Menindaklanjuti hal tersebut perlu disusun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dimaksudkan untuk menyusun DPPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk :

- Menyusun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup :

1. Penyusunan DPPA APBD tahun 2025;
2. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal.

Tahapan kegiatan :

1. Menyiapkan SK Tim Penyusun;
2. Menyusun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2025 termasuk menyusun kebutuhan dana kegiatan;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait untuk penyusunan DPPA SKPD;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan TAPD terkait keabsahan dokumen;
5. Rapat koordinasi internal dan eksternal;
6. Memprint, penggandaan dan penjilidan DPPA.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola.

D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Desember.

Time Schedule
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1.	Perencanaan													
2.	Penyusunan DPPA													
3.	Koordinasi internal dan eksternal													
4.	Cetak dan jilid DPPA													

E. Rencana Penganggaran

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

1. Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.000.000,-

Terdiri dari belanja ATK dan cetak (penggandaan).

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah tahun 2025.

Palangka Raya, Januari 2025

Mengetahui :

Plt. SEKRETARIS,



JAYA, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691230 199512 1 003

PPTK,



Yeri, A.Md

NIP. 19790515 200903 1 001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

- Kegiatan** : Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan** : Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kode Rekening** : 1.05.01.1.01.0006
- Pagu Anggaran** : Rp. 58.000.000,-

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025**

Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
Rek. Sub Kegiatan	:	1.05.01.1.01.0006	
Capaian Program	:	Persentase Keterlaksanaan	: 100%
Masukan	:	Jumlah dana yang tersedia	: Rp. 58.000.000
Keluaran	:	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	: 4 dokumen
Kelompok Sasaran	:	Satpol PP Provinsi Kalteng	

A. Latar Belakang

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, tujuan yang harus dicapai adalah “Memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Serta Menegakkan Peraturan Daerah/Kepala Daerah, serta Perlindungan Masyarakat,” dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah provinsi;
2. Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel;

Dari sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel, salah satu indikatornya adalah nilai evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada tahun 2025 target yang harus dicapai adalah minimal B atau BB. Untuk mewujudkan pencapaian indikator tersebut, tentunya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Laporan pertanggungjawaban yang disusun masing-masing SKPD menjadi dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala daerah yang dalam beberapa tahun terakhir selalu mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Dengan terlaksananya kegiatan ini, kita berharap predikat WTP ini dapat dipertahankan untuk tahun 2025.

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dimaksudkan untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja SKPD untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk :

- Memonitor dan mengevaluasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025.

B. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2025;
2. LKPJ, LPPD dan Laporan SPM tahun 2024;
3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun 2025;
4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah (e Monev);
5. Laporan evaluasi pelaksanaan renja triwulanan Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Tahapan kegiatan :

1. Membuat SK pelaksana kegiatan;
2. Mengumpulkan dan merekap laporan fungsional bendahara pengeluaran;
3. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan LKPJ, LPPD, LKIP dan Laporan SPM (tahunan);
4. Menyusun laporan LKPJ, LPPD, LKIP dan Laporan SPM (tahunan);
5. Melaksanakan koordinasi eksternal dengan stakeholder terkait untuk penyusunan laporan;
6. Melakukan koordinasi internal dengan Bidang dan Sub Bagian;
7. Membuat laporan realisasi fisik dan keuangan (bulanan);
8. Menyusun laporan e Monev Renja melalui aplikasi e planning (triwulan);
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
10. Pelaksanaan pelaporan.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola.

C. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Desember.

Time Scheedule
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No	Uraian	Jan	Febr	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
1.	Perencanaan													
2.	Pengumpulan bahan laporan													
3.	Penyusunan laporan													
4.	Koordinasi Internal dan Eksternal													
5.	Monitoring dan Evaluasi													

D. Rencana Penganggaran

Untuk mendukung kegiatan, telah disusun rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :

1. Belanja Barang dan Jasa Rp. 58.000.000,-
Terdiri dari belanja ATK, cetak (penggandaan), dan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

Demikianlah KAK ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah tahun 2025.

Palangka Raya, Januari 2025

Mengetahui :

Plt. SEKRETARIS,



JAYA, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691230 199512 1 003

PPTK



Yeri, A.Md

NIP. 19790515 200903 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PROVINSI	
TAHUN	2025
1. Informasi Umum	
1.1 Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
1.2 Penanggung Jawab	BARU, S.Pd., M.si
1.3 Waktu Pelaksanaan	12 BULAN
1.4 Referensi Perencanaan	a. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Program penunjang urusan pemerintah Daerah Provinsi b. Sasaran : Administrasi umum PD
2. Rincian Aktivitas	
2.1 Deskripsi Ringkas	a. Pelayanan administrasi umum PD merupakan sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan dalam setiap organisasi, bahkan instansi pemerintah yang salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah; b. Kegiatan organisasi khususnya perkantoran tak lepas dari kegiatan pelayanan administrasi umum PD. Hal ini sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan. Kegiatan ini seluruhnya menunjang keberlangsungan aktivitas perkantoran, sehingga menjadikan kegiatan kantor berjalan baik. c. Salah satu langkah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, maka perlu didukung dengan dana untuk kegiatan operasional dimaksud. d. Adapun pelayanan administrasi perkantoran meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ➤ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ➤ Fasilitasi Kunjungan Tamu ➤ Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah, dan ➤ Dukungan Pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik. e. Agar pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan perencanaan dan pendanaan setiap aktivitas dengan baik.

2.2 Sasaran (Outcome)	Administrasi umum PD yan berjalan tertib, baik dan sesuai perencanaan
2.3 Keluaran yang diharapkan	Administrasi perkantoran yang baik dan tepat waktu
2.4 Indikator dan Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Pelayanan administrasi umum PD yang berjalan dengan baik dan lancar b. Target Kinerja: 12 bulan
2.5 Lokasi	Palangka Raya

3. Tahapan Aktivitas (Time Schedule)

No	Tahapan Aktivitas	Waktu (Bulan)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor													
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan													
4	Dukungan Pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik													
5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah													

4. Anggaran dan Sumber Dana

Sumber Dana: APBD Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga	Total
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	65.000.000	65.000.000
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	75.000.000	75.000.000
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	79.738.000	79.738.000
4	Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	12 bulan	73.000.000	73.000.000

5.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	440.188.036.25	440.188.036.25
	JUMLAH			2.755.908.282,25

5. Lain-lain

Palangka Raya, Januari 2025

Mengetahui
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah,



BARU, S.Pd., M.Si
NIP.19700228 199803 1 007

PPTK,

ABRAHAM AGUSTO RAHAIL, SH
NIP.19841030 201001 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PROVINSI	
TAHUN	2025
1. Informasi Umum	
1.5 Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
1.6 Penanggung Jawab	BARU, S.Pd., M.si
1.7 Waktu Pelaksanaan	12 BULAN
1.8 Referensi Perencanaan	<p>a. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Program kegiatan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>b. Sasaran : Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.</p>
2. Rincian Aktivitas	
2.7 Deskripsi Ringkas	<p>a. Jasa penunjang pemerintah Daerah merupakan sesuatu yang wajib dan harus ada dalam setiap organisasi, bahkan instansi pemerintah yang salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Palangka Raya;</p> <p>b. Kegiatan organisasi khususnya Jasa pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah tak lepas dari kegiatan pelayanan administrasi umum PD. Hal ini sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan. Kegiatan ini seluruhnya menunjang keberlangsungan aktivitas perkantoran, sehingga menjadikan kegiatan kantor berjalan baik.</p> <p>c. Salah satu langkah dalam pelaksanaan kegiatan Jasa pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah, makaperlu didukung dengan dana untuk kegiatan operasional dimaksud.</p> <p>d. Adapun Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ➤ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya <p>e. Agar jasa pemeliharaan barang milik daerah dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan perencanaan dan pendanaan setiap aktivitas dengan baik.</p>

2.8 Sasaran (Outcome)	Barang milik Daerah berfungsi dengan baik
2.9 Keluaran yang diharapkan	Pemeliharaan barang milik Daerah
2.10 Indikator dan Target Kinerja	c. Indikator Kinerja : Pemeliharaan barang milik daerah berjalan dengan baik d. Target Kinerja: 12 bulan
2.11 Lokasi	Palangka Raya

3. Tahapan Aktivitas (Time Schedule)

No	Tahapan Aktivitas	Waktu (Bulan)													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

4. Anggaran dan Sumber Dana

Sumber Dana: APBD Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga	Total
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	400.000.000	400.000.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	125.000.000	125.000.000
	JUMLAH		525.000.000	525.000.000

5. Lain-lain

Palangka Raya, Januari 2025

Mengetahui
Kepala Satuan Polisi Pamong
Provinsi Kalimantan Tengah,

PPTK,



BARU, S.Pd., M.Si
NIP. 19700228 199803 1 007

ABRAHAM AGUSTO RAHAIL, SH
NIP.19841030 201001 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
PROVINSI PROVINSI	
TAHUN	2025
1. Informasi Umum	
1.9 Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
1.10 Penanggung Jawab	BARU, S.Pd., M.si
1.11 Waktu Pelaksanaan	12 BULAN
1.12 Referensi Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai Tupoksi sebagai Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk melaksanakan tugas kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran dan Tahunan SKPD. b. Untuk pencapaian pelaksanaan kegiatan selanjutnya didukung oleh Surat Keputusan tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan c. Sasaran : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
2. Rincian Aktivitas	
2.13 Deskripsi Ringkas	<ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai Tupoksi sebagai Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk melaksanakan tugas kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN; b. Dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan dukungan dari semua ASN dalam rangka penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang kesemuannya berhubungan dalam pemberian data untuk penyediaan gaji c. Untuk mendukung keberhasilan dalam penyediaan gaji dan tunjangan ASN, diperlukan data yang tepat untuk pembuatan daftar gaji dan tunjangan pegawai. d. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Akhir Tahun sebagai.
2.14 Sasaran (Outcome)	ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
2.15 Keluaran yang diharapkan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN dan tersediannya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan dan Tahunan SKPD
2.16 Indikator dan Target Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Indikator Kinerja : Terbayarnya gaji dan tunjanganASN ,dan Tersediannya laporan keuangan SKPD b. Target Kinerja: 12 bulan, 100 %
2.17 Lokasi	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
3. Tahapan Aktivitas (Time Schedule)	

No	Tahapan Aktivitas	Waktu (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Gaji dan tunjangan ASN												
2	Tambahan penghasilanASN												
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD												
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												

4. Anggaran dan Sumber Dana

Sumber Dana: APBD Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga	Total
1.	Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	32.093.765.133,00	32.093.765.133,00

5. Lain-lain

Palangka Raya, Januari 2025

Mengetahui
Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Kalimantan Tengah,



BARU, S.Pd. M.Si
NIP.19700228 199803 1 007

PPTK,

ABRAHAM AGUSTO RAHAIL, SH
NIP.19841030 201001 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PROVINSI**

TAHUN	2025
1. Informasi Umum	
1.13 Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
1.14 Penanggung Jawab	BARU, S.Pd., M.si
1.15 Waktu Pelaksanaan	12 BULAN
1.16 Referensi Perencanaan	c. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Program penunjang urusan pemerintah Daerah Provinsi d. Sasaran : Jasa penunjang urusan pemerintah Daerah
2. Rincian Aktivitas	
2.19 Deskripsi Ringkas	<p>a. Jasa penunjang urusan pemerintah Daerah merupakan sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan dalam setiap organisasi, bahkan instansi pemerintah yang salah satunya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya;</p> <p>b. Kegiatan organisasi khususnya perkantoran tak lepas dari Jasa penunjang urusan pemerintah Daerah. Hal ini sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan. Kegiatan ini seluruhnya menunjang keberlangsungan aktivitas perkantoran, sehingga menjadikan kegiatan kantor berjalan baik.</p> <p>c. Salah satu langkah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, maka perlu didukung dengan dana untuk kegiatan operasional dimaksud.</p> <p>d. Adapun pelayanan administrasi perkantoran meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan Jasa Surat Menyurat ➤ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ➤ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>e. Agar pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan perencanaan dan pendanaan setiap aktivitas dengan baik.</p>
2.20 Sasaran (Outcome)	Jasa penunjang urusan pemerintah Daerah
2.21 Keluaran yang diharapkan	Jasa penunjang urusan pemerintah Daerah terpenuhi
2.22 Indikator dan Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jasa penunjang urusan pemerintah Daerah yang baik b. Target Kinerja: 12 bulan
2.23 Lokasi	Palangka Raya

3. Tahapan Aktivitas (Time Schedule)

No	Tahapan Aktivitas	Waktu (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

4. Anggaran dan Sumber Dana

Sumber Dana: APBD Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tahapan Aktivitas	Satuan Volume	Harga	Total
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	10.000.000	10.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	281.057.754,00	281.057.754,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	9.365.880.000,00	9.365.880.000,00
	JUMLAH			9.656.937.754,00

5. Lain-lain

Mengetahui
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah,



BARU S.Pd. M.si
NIP.19700228 199803 1 007

Palangka Raya, Januari 2025

PPTK,

ABRAHAM AGUSTO RAHAIL, SH
NIP.19841030 201001 1 006